

**PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA**
(Studi Kasus Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

ASMIRIJAL
NIM : 1805906030041



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI**

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh 15 Juni 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ASMIRIJAL
NIM : 1805906030041

Dengan judul: Pengaruh Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap
Perkembangan Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan
Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)

Mengesahkan,

Pembimbing

Lilis Marlina, S.E, M.Si
NIP.198304042010032003

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Dr. Hamdi Harmen, SE, MM
NIP:196911082002121001

Sekretaris Jurusan Akuntansi

Sari Maulida Vonna, S.E, MSi, Ak
NIP: 198910052019032037





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh 15 Juni 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ASMIRIJAL
NIM : 1805906030041

Dengan judul: Pengaruh Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap
Perkembangan Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan
Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)

Yang telah dipertahankan didepan komisi Ujian pada Juni 2023

Menyetujui

Komisi Ujian

1. Ketua : Lilis Marlina, S.E, M.Si
2. Sekretaris : Rina Maulina , S.E, M.Si, Ak
3. Anggota : Fatmayanti , S.E, M.Si

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengetahui :

Sekretaris Jurusan Akuntansi


Sari Maubda Yonna, S.E, M.Si, Ak
NIDN/NIP 1989100520190320.7



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ASMIRIJAL

NIM : 1805906030041

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 15 Juni 2023




ASMIRIJAL
NIM: 1805906030041

PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. At-Taubah : 18).”

Yang utama dari segalanya puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan petunjuk, cinta dan kasih sayangnya, dan kekuatan, serta kemudahan sehingga akhirnya bisa terselesaikan skripsi ini.

Ayah, ibu.

Terselesaikan amanah ini tak luput dari doa Mu yang telah Allah ijabah, doa di setiap sujudmu, cucuran air mata mu, dan segala keluh kesah telah engkau korbakan untuk langkah ku, Rasa terima kasih tak cukup rasanya menggambarkan rasa syukur ku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan bapak ibu sebagai orang tua ku, tak banyak yang dapat ku lakukan demi secercah harapan yaitu sedikit kebahagiaan dan senyuman di wajah mu. izin kan ku persembahkan hasil akhir perjuangan ku, Allah mengetahui usahaku, engkau menyaksikan perjuangan ku, saya persembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat mencintaiku dan akupun sangat mencintai keduanya, mereka orang tuaku Bapak T. Umarsali dan Ibu Kasmawati. Terimakasih Ayah Ibu yang telah membesarkan ku dengan kasih sayang, selalu memberi dukungan, doa setiap langkah ku, tiada kata yang pantas aku ucapkan kepada kalian yang telah mendidik ku, bekerja keras demi masa depanku, mengorbankan kehidupan mu, setiap butir keringat mu, demi anakmu,

Beserta semua keluarga besar ku :

yang selalu menyemangati ku dalam mencapai keberhasilan ini, banyak nya hambatan dan rintangan bukan suatu alasan bagi ku, demi mewujudkan mimpi dan keinginan orang tua demi melihat anak pertamanya wisuda di masa senja.

Teruntuk dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, beribu Terimakasih saya ucapkan yang telah tulus ikhlas membimbing, menuntun, dan menyemangati saya dalam menggapai cita, yang tidak dapat saya membalasnya. "Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat."

Beserta sahabat-sahabat ku terimakasih telah memberiku warna, mengajarkan arti persahabatan, yang selalu saling menyemangati dalam proses menyelesaikan skripsi ini, "Teman menunjukkan cinta mereka di saat ada masalah, bukan di saat bahagia"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhoan dan keberkahan dalam berkarya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Perkembangan Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)”**. karena hanya kepada-Nyalah kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam diseluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun sampaikan tulus terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M. Si, Selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
2. Bapak Dr. Hamdi Harmen, S.E, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
3. Ibu, Sari Maulida Vonna S.E, M.Si. Ak, Selaku Ketua program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

4. Ibu Lilis Marlina, S,E, M.Si, Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini;
5. Terimakasih kepada Pemerintah desa di Kecamatan Simeulue Barat, kabupaten Simeulue.
6. Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta T.Umarsali dan Ibunda Kasmawati dan semua keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
7. Terimakasih kepada teman-teman saya yaitu Gustamin Mahmud, Muhammad Yersa Ananda, Rizki Firanda, Jabar Jati, Hamza Abdurahman, Ibnu Kasim dan seluruh mahasiswa angkatan 2018 Program Studi Akuntansi lainnya yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. Berkenan membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa mamfaat bagi pengembangan ilmu.

Meulaboh, 15 Juni 2023

ASMIRIJAL

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ASMIRIJAL
NIM : 1805906030041
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Perkembangan Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 15 Juni 2023
Yang Menyatakan



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pelaksanaan prinsip *Good Governance* terhadap perkembangan pembangunan desa yang ada di kecamatan simeulue barat, kabupaten Simeulue, populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, kepala seksi kesejahtraan, kepala seksi pemerintahan, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, sekretaris desa, dari 14 desa yang ada di kecamatan simeulue barat, kabupaten simeulue yang berjumlah 84 orang, sampel dalam penelitian ini adalah 6 desa yang ada di kecamatan simeulue barat, dengan kategori desa yang belum mandiri/tertinggal, dan 36 aparatur desa dari 6 sampel desa tersebut, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Sederhana. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan metode kuesioner, hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung yang di peroleh adalah sebesar $= 0,000 < 0,05$. Nilai t hitung tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa.

Kata kunci: *Good Governance*, perkembangan pembagunan desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the implementation of the principles of Good Governance on the development of village development in Simeulue Barat District, Simeulue District, the population in this study are village heads, heads of welfare sections, heads of government sections, heads of financial affairs, heads of planning affairs, secretaries villages, of the 14 villages in Simeulue Barat sub-district, Simeulue district, totaling 84 people, the sample in this study were 6 villages in Simeulue Barat sub-district, with the category of villages that were not yet independent/left behind, and 36 village officials from 6 sample villages the. The data analysis method used in this research is Simple Liner Regression analysis. The data in this study used primary data obtained by the questionnaire method. The results showed that the calculated t value was $0.000 < 0.05$. The calculated t value indicates that the effect of implementing the principles of Good Governance has a significant effect on the development of village development.

Keywords: Good Governance, village development.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumus Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Pembangunan.....	8
2.1.2 Desa	9
2.1.3 Pembangunan Desa.....	10
2.1.4 Pengertian Good Governance	11
2.1.5 Prinsip Good Governance	13
2.1.6 Hasil Penelitian Sebelumnya	15
2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
2.2.1 Pengaruh Good Governance Terhadap Perkembangan Pembangunan	18
2.3 Hipotesis	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	21
3.2 Populasi Dan Sampel	23
3.2.1 Populasi	23
3.2.2 Sampel	23

3.3 Sumber Dan Teknik Pengambilan Data.....	24
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	25
3.4.1 Variabel Dependen	25
3.4.2 Variabel Independen	25
3.5 Metode Analisis Data.....	26
3.5.1 Skala Liker	27
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	28
3.5.3 Uji Instrumen Penelitian	29
3.5.4 Pengujian Hipotesis	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambar Umum Objek Penelitian.....	32
4.2 Karakteristik Responden.....	33
4.3 Deskriptif Statistik	36
4.4 Analisis Data.....	37
4.4.1 Uji Validitas.....	37
4.4.2 Uji Reliabilitas	39
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	39
4.5.1 Uji Normalitas.....	39
4.5.2 Uji Heteroskedatisitas	40
4.6 Analisis Regresi Linier Sederhana.....	41
4.7 Pengujian Hipotesis	43
4.7.1 Uji Parsial (T-Test)	43
4.7.2 Koefesien Determinan	44
4.8 Pembahasan Penelitian.....	45
4.8.1 Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Good Governance Terhadap Perkembangan Pembangunan Desa	45
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	16
Tabel 3.1 Nama-Nama Desa Yang Berda Di Kecamatan Simeulue Barat	22
Tabel 3.2 Definisi Oprasionel Variabel	26
Tabel 3.3 Alternatif Jawabana Dengan Skala Likert.....	28
Tabel 4.1 Rincian Pengambilan Kuesioner	33
Tabel 4.2 Umur Responden.....	34
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden	34
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan	35
Tabel 4.5 Jabatan Responden	35
Tabel 4.6 Uji Data Deskriptif Statisti.....	36
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	38
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas	39
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	40
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	41
Tabel 4.11 Hasil Regresi Linear Sederhana	42
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik T	43
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefesien Determinasi	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	53
Lampiran 2 Tabulasi Responden	57
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Humairah & Lestari, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Desa tersebut, sebuah desa diberikan penguatan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa tersebut. Selain itu, desa juga diberikan kewenangan terhadap sumber-sumber pendapatannya (Astuti, dkk, 2021).

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahun, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan dan dikelola desa sendiri. Data Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa dana desa telah dianggarkan tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi sekitar Rp 280 juta. Selanjutnya, anggaran dana desa pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sekitar Rp 628 juta, sedangkan dana desa pada tahun 2017

kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sekitar Rp 800 juta (Kemenkeu, go.id)

Nasution (2018) menyatakan tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini, kabupaten simeulue, sudah memperoleh dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp 121 Miliar di tahun 2020 yang diperuntukkan bagi setiap gampong yang ada di simeulue. Apabila dibagi rata maka tiap gampong sudah menerima anggaran dana desa sebesar Rp 662 juta namun demikian walaupun kucuran dana dari pemerintah begitu besar, kehidupan masyarakat desa dalam kabupaten Simeulue belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan laporan dari Dinas komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Simeulue menyatakan sebanyak 13 desa di kabupaten simeulue kepulauan belum terjangkau jaringan internet, peningkatan ekonomi masyarakat maupun pembangunan infrastruktur masi sangat tertinggal sehingga masyarakat Simeulue, khususnya di Simeulue Barat belum di katakana sebagaian desa yang maju dan mandiri dari sisi sarana dan prasarana publik yang terdapat di beberapa desa di kabupaten Simeulue. Banyaknya desa yang terkategori sebagai desa tertinggal di mana proses pembangunan infrastruktur yang belum merata. (Replubika, Co, Id, 7 Februari 2022).

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam partisipasi warga desa yaitu warga yang enggan terlibat dalam forum-forum pembahasan kemajuan desa, sebab seruan atau usulan warga jarang ditanggapi oleh pemerintah desa sehingga masyarakat desa merasa jenuh sebab usulan mereka tidak terlealisasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam Pembangunan Desa ialah kurangnya Pembangunan infrastruktur yang ada dipedesaan seperti sarana dan prasarana kesehatan, sarana transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, rusaknya jalan menuju areal pertanian, minimnya sarana air bersih serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Permasalahan pembangunan yang ada di desa tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa guna meningkatkan perbaikan atas pembangunan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat desa (Siregar, 2020).

Purwaningsih (2008) menyatakan permasalahan pembangunan desa senantiasa berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan (*employment gap*), akses dan kesempatan terhadap faktor produksi (*homogeneity gap*), dan informasi yang berkaitan dengan pasar (*information gap*). Dari kesenjangan (*gap*) itulah kemudian berkembang menjadi beberapa permasalahan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan, pembangunan bertujuan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Upaya penghapusan kemiskinan di Indonesia masih mengalami kesulitan karena berbagai faktor, misalnya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Fenomena kemiskinan di desa juga diwarnai oleh bias gender dimana wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah.

2. Kesenjangan yaitu pada pendapatan, dimana pendapatan petani miskin semakin menurun dan petani kaya semakin kaya. Kesenjangan juga terjadi pada pemilikan luas lahan pertanian, dimana kepemilikan lahan pertanian kurang dari 0,25 Hektar semakin bertambah dari tahun ke tahun
3. Kegagalan transformasi, yaitu akibat dari strategi industrialisasi yang tidak terarah dengan mengabaikan sektor pertanian. Keuntungan hasil pertanian semakin berkurang akibat dari kenaikan harga produksi dan biaya hidup, yang tidak cukup diimbangi dengan kenaikan perolehan hasil panen.

Salah satu faktor yang menghambat pembangunan desa karena pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan sesuai prinsip *good governance*. Maharani (2017) menyatakan *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Untuk mencapai *good governance* dalam tata kelola pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan *stakeholder*, berorientasi pada consensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Adanya permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola keuangan desa. Hasil studi yang dilakukan Rustiarini (2016) menyatakan pengelolaan keuangan dengan *good governance* terbukti telah banyak membawa dampak yang positif bagi tata kelola

pemerintahan. Melihat pentingnya penerapan prinsip *good governance* ini menjadikan prinsip *good governance* sebaiknya dapat diaplikasikan di setiap sektor pemerintahan termasuk sektor keuangan publik di tingkat desa dengan memperhatikan agenda kebijakan pemerintah. Salah satu faktor yang menghambat pembangunan desa karena pengelolaan keuangan belum di laksanakan sesuai prinsip *good governace* (Rahajeng, 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang di lakukan oleh penelitian tentang *Good Governance* dan pembangunan Desa (Saifuddin 2020 dan Nasution 2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan belum konsisten. Hasil penelitiannya saifuddin menunjukkan mayoritas responden mengatakan bahwa tata kelola pembangunan sesuai dengan penerapan *Good governance* sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Cot Peutano yang telah cukup transparan, karena setiap tahun pemerintah desa selalu mengadakan rapat terbuka terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dimana rapat ini mengundang seluruh elemen masyarakat gampong yang ada di Desa Cot Peutano.

Penelitian selanjutnya Nasution (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik

terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Saifuddin 2020 dan Nasution 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya lebih kepada pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pembangunan desa di kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue. Kemudian penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Perkembangan Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh penerepan *good governace* terhadap perkembangan pembangunan desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- a. Dapat memberikan gagasan dan kerangka pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum dan akuntansi pemerintahan secara khusus.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap perkembangan pembangunan desa

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini bisa menjadi landasan dan referensi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk terus meningkatkan perkembangan pembangunan desa.
- b) Memberikan masukan bagi pemerintah desa untuk terus mengoptimalkan fungsi dari keuangan desa dalam peningkatan perkembangan pembangunan desa.
- c) Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses perkembangan pembangunan desa untuk kemudian dievaluasi oleh pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembangunan

Pembangunan sebagai proses perubahan yang melibatkan semua elemen masyarakat: ekonomi, sosial-budaya, politik, struktur fisik, dan sistem nilai dan cara hidup masyarakat, gagasan ini secara komprehensif menyatukan ide-ide tentang pembangunan dan transformasi masyarakat dari berbagai disiplin ilmu. Proses pembangunan dan menganalisis berbagai aspek konsep pembangunan. Ini memberikan wawasan yang kaya tentang karakteristik masyarakat berkembang, teori pembangunan ekonomi, masalah demografis dalam pembangunan, peran pembangunan pertanian dalam transformasi ekonomi, proses urbanisasi dan pengembangan pasar yang terjadi bersamaan, dan aspek pembangunan sosiologis dan politik. (Portes, 1976; Alexander, 1994) (Mahadiansar, dkk, 2020).

Siagian (2000) mengatakan pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian dari pertumbuhan dan perubahan oleh sebuah negara menuju ke era modernisasi sebagai upaya pembinaan bangsa atau *nation building*. Bratakusumah (2005) pembangunan memiliki arti berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya ataupun daerah yang satu sama daerah lainnya, baik pun ke negara satu dengan negara lainnya sehingga secara umum pembangunan merupakan hasil kesepakatan untuk melakukan proses perubahan pada sebuah peristiwa.

Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut Loekman Soetrisno, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana, perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat, melainkan juga pada peranan dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembangunan, yaitu negara dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sendiri tidak diukur dari seberapa jauh pembangunan tersebut meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan yang ditimbulkan untuk mandiri, dalam arti ada kemauan masyarakat untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan. (Purwaningsih 2008)

2.1.2 Desa

Desa sebagai salah satu satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukim dalam suatu daerah tertentu. Desa mempunyai kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab keperluan seluruh masyarakat setempat. Desa memiliki hak melakukan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap desa (Samaun & Mediansyah, 2022).

Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan perubahan yang maksimal. Desa merupakan bagian terpenting dari struktur pemerintah dalam mewujudkan kesuksesan program pemerintah pusat. Dalam hal ini desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat untuk lebih cepat menyampaikan informasi tentang program pemerintah. Desa berperan untuk melayani serta menata pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan desa (Samaun & Mediansyah, 2022).

Desa yang maju merupakan desa yang dapat mengelola sumber daya alam menjadi suatu yang bernilai guna. Artinya, masyarakat sudah mampu mengolah sumberdaya alam yang menjadi ciri khas desa tersebut dan mengkonversinya dalam bentuk upah yang layak. Peningkatan ekonomi desa juga dibangun dari munculnya banyak UMKM yang berasal dari desa tersebut. UMKM ini sendiri merupakan badan usaha produktif dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (Lisnawati & Lestari (2019).

2.1.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang Layak. Masyarakat atau penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan atau pelososok. Dengan jumlah penduduk dan keadaan alam yang meningkat dan berlimpah pemerintah desa akan mendapatkan Aset melalui program pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (ADD) berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan wewenangnya dalam mengatur dan mengelola pemerintahan dan

kepentingan rakyat, desa-desa membutuhkan sumber pendapatan (Rimawan & Aryani, 2019).

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman (Siregar, 2020).

Menurut Kartasasmita (2009) mengatakan bahwa hakikat pembangunan adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siregar, 2020).

2.1.4 Pengertian *Good Governace*

Istilah *good governance* seringkali disebut tata kelola yang baik dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, prinsip *good governance* di setiap penyelenggaraan pemerintahan berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat senantiasa mengaplikasikan konsep *good governance*, begitu juga dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Dana Desa dalam pengelolaannya juga harus punya tata kelola yang baik. Hal ini menjadi penting karena Dana Desa

selain menguntungkan untuk pembangunan tetapi jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi penyelewengan-penyelewengan salah satunya tindakan korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mampu memahami bagaimana tata cara mengelola keuangan yang baik. Relevan dengan hal ini, maka konsep *good governance* dapat diaplikasikan di dalam pengelolaan Dana Desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (Rahajeng, 2021).

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, yang oleh Sofyan bahwa sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya (Efendy, 2009). Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, *term good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Tuhumury & Wance, 2020).

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas negara. Sedangkan dalam *governance*

mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Menurut Samodra bahwa *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan istitusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun “*governance without government*” (Tuhumury & Wance, 2020).

2.1.5 Prinsip Good Governace

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata prinsip memiliki makna yaitu “asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak.” Sehingga, dengan upaya menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) akan membantu negara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ganie-Rochman (2000) dikutip dalam Syakrani (2009: 132) mengembangkan 4 prinsip, yakni akuntabilitas, rule of law, informasi, dan transparansi. Prinsip-prinsip yang hampir sama juga dikemukakan Bhatta (1997) bahwa unsur utama *governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*.

Berikutnya UNDP (1997) dikutip dalam Mindarti (2016: 14) menyatakan bahwa prinsip dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi *Participation* (partisipasi), *Rule of law* (aturan hukum), *Transparency*

(transparansi), *Responsiveness* (daya tanggap), *Consensus Orientation* (orientasi konsensus), *Equity* (keadilan), *Efficiency and effectiveness* (efisiensi dan efektivitas), *Accountability* (pertanggungjawaban), *Strategy vision* (visi strategi). Dari berbagai prinsip-prinsip *good governance* tersebut, penelitian ini akan menggunakan tiga dari empat prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (2012:7), yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Seperti yang disimpulkan oleh Sedarmayanti bahwa empat prinsip atau prinsip utama tersebut yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan *good governance*.

Prinsip Akuntabilitas Guy Peter (2000) menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002: 21) terdiri dari akuntabilitas vertikal dan horizontal dimana akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Menurut Teguh (2004: 23) terdapat indikator atau cara yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas yaitu ditandai dengan bagaimana tingkat pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugas, apakah terdapat praktik KKN.

Prinsip Transparansi Lalolo (2003: 13) mendefinisikan transparansi sebagai suatu prinsip yang dapat menjamin akses atau memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan dengan memberikan informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Adapun pernyataan Kristiantem yang dikutip dalam Rahmawati (2015) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu, kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi.

2.1.6 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya adalah upaya dari peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu hasil penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti dalam menentukan kerangka penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Hasil penelitian sebelumnya juga merupakan tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah menghimpun beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian terdahulu yang akan dijelaskan mempunyai perbedaan satu sama lain baik dari segi objek, waktu dan salah satu variabel penelitian. Penelitian tersebut akan menjadi dasar dan acuan untuk mendukung penelitian. Dalam hal ini, hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Metode Analisis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Membangun <i>Good Governace</i> Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Wayeme Kecamatan Teluk Ambon).	Yoana J. Tuhumury Marno Wance (2020)	Analisi Deskriptif Kualitatif	Untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemanfaatan Desa Di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan desa Wayame dalam pengelolaan DD dan ADD sudah dapat dikatakan transparan. Sedangkan untuk Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pemanfaatan dana desa di Desa Wayame sudah berjalan namun masih belum maksimal.
2	Penerapan <i>Good Governace</i> dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa	Nilayanti, Nasruddin, Saifuddin (2020)	Analisis Deskripsif Kualitatif	Untuk mengetahui dan menguji pengaruh penerapan <i>Good Governace</i> dalam pelaksanaan pembangunan di Desa	hasil penelitian dilapangan mayoritas responden mengatakan bahwa tata kelola pembangunan sesuai dengan penerapan <i>Good governance</i> sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Cot Peutano yang telah cukup transparan, karena setiap tahun pemerintah desa selalu mengadakan rapat terbuka terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Jurnal 22
3	Penerapan Prinsip–Prinsip <i>Good Governance</i>	Rahajeng (2021)	Analisis Deskripsif Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis	Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib

	Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas			sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu belum mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi yang diterapkan juga belum tegas.
4	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).	Hayati, I (2021)	Metode penelitian kualitatif	Untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan perempuan, selanjutnya untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan perempuan desa. Untuk mengukur peran pemerintah desa, penulis menggunakan dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa antara	Hasilnya bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi policy (kebijakan), strategy (strategi), dan communication (komunikasi). Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan desa yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, kemudian kurangnya minat, kurangnya kepedulian, ketertarikan dan

				lain: 1). kebijakan, strategi, dan komunikasi.	rendahnya partisipasi para perempuan yang ada di desa dalam menjalankan usaha kecil menengah yang telah pemerintah berikan.
5	Perkembangan Dan Pembangunan Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung	Sudrajat & Darusman, (2018)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey jenis deskriptif.	Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor geografis yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan desa padamukti pada tahun 2014-2015.	Hasil penelitian, dari data yang diperoleh di lapangan dan analisisnya, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut : kondisi tanah yang subur di sertai kualitas dan kuantitas air yang cukup menunjang pertanian. Sarana dan prasarana transportasi sangatlah kurang, angkutan umum (angkot, andes) belum ada di Desa Padamukti meskipun sarana jalan cukup mendukung. 45,2 % penduduk bermata pencaharian sebagai petani itu bisa menjadi potensi besar desa untuk mengembangkan pertaniannya yang lebih baik lagi.

Sumber : Data diolah tahun 2023

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Perkembangan Pembangunan

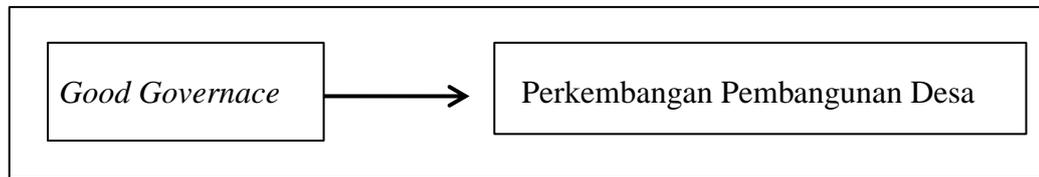
Governance berkembang semakin populer dengan sebutan pemerintahan. Namun, makna pemerintahan tersebut tidak hanya sebagai suatu kegiatan tetapi di dalamnya terdapat arti kepengurusan, pengelolaan, ada pengarahan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan (Rahajeng, 2021). *Good*

governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut disebut sebagai administrasi pembangunan. Pada dasarnya, penerapan tata pemerintahan yang baik merupakan pelayan publik yang lebih baik kepada masyarakat, maka dari itu *good governance* ini sangat penting di terapkan di Desa (Sulaeman, dkk, 2019).

Untuk mengetahui hubungan anantara penerapan *good goverance* terhadap perkembangan pembangunan desa di perlukan suatu indikator untuk masing-masing variabel penelitian. Adapun indikator yang di gunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan desa adalah pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Sedangkan indikator untuk *good governace* adalah transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum.

Peneliti yang di lakukan oleh nilayanti, dkk (2020) yang berjudul Penerapan *Good Governace* dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa. Hasil penelitian dilapangan mayoritas responden mengatakan bahwa tata kelola pembangunan sesuai dengan penerapan *Good governance* sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Cot Peutano yang telah cukup transparan, karena setiap tahun pemerintah desa selalu mengadakan rapat terbuka terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut



Gambar 2.1 kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Bedasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas maka peneliti menyusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Penerapan *good governace* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa

H_0 = Penerapan *good governace* tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pembangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komrensif yang sedemikian rupa, agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset (Umar, 2007:6). Desain penelitian ini mencakup kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti dan merupakan konsep dasar yang menjadi tolak ukur peneliti dan dapat meberikan gambaran secara keseluruhan mengenai informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Adapaun desain penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*) yang dikembangkan berdasarkan teori-teori sebelumnya sehingga dapat memperoleh kesimpulan mengenai pengaruh dari pelaksanaan prinsip *good governance* dalam perkembangan pembangunan desa.

2. Jenis Investigasi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018;13). Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3. *Setting* Penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini di lakukan di desa-desa yang berada di Kecamatan Simeulua Barat Kabupaten Simeulue. Yang berjumlah sebanyak 6 Desa Penelitian akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2022.

Tabel 3.1
Nama-Nama Desa yang berada
Di kecamatan Simeulue Barat

No	Desa, Kelurahan
1	Desa Amabaan
2	Desa Mituem
3	Desa Lhok Bikhao
4	Desa Ujung Harapan
5	Desa Sanggiran
6	Desa Lhokmakmur

Sumber : Data diolah tahun 2023

4. Tingkat Keterlibatan peneliti

Peneliti melakukan penelitian secara mandiri di Desa yang ada di Kecamatan Simeulue Barat dengan menggunakan metode penelitian yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian untuk melakukan pertemuan dengan pihak terkait dan responden penelitian guna mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti tidak akan melakukan manipulasi data hasil penelitian yang diperoleh

5. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti baik berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa (Hamidi, 2010:95). Adapun unit

analisis yang dalam penelitian ini adalah 36 orang responden yang berasal dari Aparatur Desa yang ada di kecamatan Simeulue Barat.

6. Horizon Waktu

Horizon waktu merupakan kurun waktu pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, horizon waktu yang digunakan adalah *Cross Sectional*. Dalam Horizon waktu cross-sectional, waktu pengukuran atau observasi data variabel dependen dan variabel independen dihitung sekaligus dalam waktu yang sama atau satu kali (Notoatmodjo, 2018)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016: 80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 84 aparatur dari seluruh aparatur desa di Kecamatan Simeulu Barat yang berjumlah 14 Desa. Setiap desa memiliki jabatan yang berbeda-beda. Maka dari itu populasi yang digunakan yaitu seluruh aparatur yang terdapat di desa kecamatan simeulu barat yakni desa Leyabaung, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Sembilan, Batu Ragi, Babul Makmur, Malasin, Amabaan, Miteum, Lhok Bikhau, Ujung Harapan, Sanggiran, Lhok Makmur.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 aparatur desa terdiri dari 6 desa yang ada di kecamatan Simeulu Barat.

3.3 Sumber Dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh dalam penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode kuesioner (angket). Menurut Sujarweni (2018) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti akan dibagikan kepada 36 orang responden yaitu Aparatur Desa yang ada di Kecamatan Simeulu Barat yang telah dipilih secara acak.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Definisi, pengukuran, dan skala pengukuran dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019:69) *Dependent Variable* sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa. Menurut Poae dan Saerang (2013:29) akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan pilihannya dan tindakannya. Dalam laporan keuangan desa, akuntabilitas merupakan Indikator bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar dan tidak ada manipulasi data yang dilakukan oleh pihak penyusun laporan keuangan desa. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan menggunakan 4 pilihan jawaban yaitu 1) sangat tidak setuju; 2) tidak setuju; 3) ragu-ragu 4) setuju; 5) sangat setuju.

3.4.2 Variabel Independen

Menurut Erwan (2011:17). Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penggunaan Aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes merupakan suatu sistem aplikasi yang dilengkapi dengan berbagai fitur melakukan pelaporan keuangan desa. (LAN, 2016:30). Variabel ini diukur dengan

menggunakan skala *likert* dengan 5 pilihan jawaban yaitu 1) sangat tidak setuju; 2) tidak setuju; 3) ragu-ragu; 4) setuju; 5) sangat setuju.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala pengukuran
1.	<i>Good Governace</i> (X)	<i>Good Governance</i> adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pecegahan korupsi.	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Supermasi Hukum	Skala Likert (1-5)
2	Pembangunan Desa (Y)	Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang di miliki.	1. Pendidikan Masyarakat 2. Kesehatan Masyarakat 3. Ekonomi Masyarakat	Skala Likert (1-5)

Sumber : Data diolah tahun 2023

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis untuk kemudian ditafsirkan guna memperoleh sebuah kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017), metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian adalah Analisis Regresi Linear Sederhana dilakukan dengan menggunakan SPSS 26. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b.x + e$$

Keterangan :

Y = variable terkait

x = variabel bebas

a = harga Y apabila X = 0 (harga konstanta)

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen, apabila b positif maka terjadi kenaikan dan apabila b negatif maka terjadi penurunan

e = Standar error

Sebelum melakukan Analisis Regresi Linear Sederhana, data yang telah dikumpulkan diuji dan diolah dengan beberapa metode di bawah ini :

3.5.1 Skala Likert

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survey dengan menggunakan 5 skala yaitu:

Tabel 3.3 Alternatif Jawaban Dengan Skala *Likert*

Simnbol	STS	TS	RR	S	SS
Nilai	1	2	3	4	5

Keterangan :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. RR : Ragu-ragu
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Selain pilihan dengan lima skala seperti contoh di atas, kadang digunakan juga skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan.

Rumus:

$T \times P_n$ T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor Likert

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016:154). Uji normalitas dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan *One Sample Kolmogorv-*

Smirnov Test. Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai *standart residual* dari model regresi. Data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan *asymptotic significance* > α (5%).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat ketidaksamaan *varians* antara residual satu pengamatan dan residual pengamatan lain dalam model regresi. Tidak adanya atau adanya heteroskedastisitas dalam model regresi yang baik (Ghozali, 2016:134). Uji *Glejser* digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan ketentuan apabila $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila $\text{sig} < 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada atau memiliki heteroskedastisitas

3.5.3 Uji Instrument Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:51) Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji validitas didasarkan pada rumus r tabel dan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ berarti butir pertanyaan dinyatakan valid dan sebaliknya jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ berarti butir pertanyaan tidak valid. Penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk *pearson correlation*.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan (Ghozali, 2018: 45). Uji reabilitas diperoleh dengan membandingkan nilai *Cronbach Alpha*. Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

3.5.4. Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Menurut Sanusi (2011:138) uji statistik t adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji t (t test) adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dengan berdasarkan pada nilai t_{hitung} . Kriteria uji hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini :

- a. Apabila $t_h < t_t$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa.
- b. Apabila $t_h > t_t$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif

(Sanusi, 2011: 136). Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011:136).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Simeulue merupakan sebuah kabupaten di Provinsi yang ada di Aceh. Kabupaten Simeulue mempunyai luas wilayah 2.310 KM², terletak antara 02° 02' 03'' – 03° 02' 04'' Lintang Utara dan 95° 22' 15''- 96° 42' 45'' Bujur Timur. Merupakan daerah kepulauan terdiri dari ± 57 buah pulau besar dan kecil, panjang pulau Simeulue ± 100,2 km dan lebar antara 8 – 28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha. Kabupaten Simeulue memiliki 138 jumlah desa yang meliputi 10 Kecamatan. Kecamatan Simeulue Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam daerah Kabupaten Simeulue. Ibu kota dari Simeulue Barat adalah Sibigo yang kini telah dimekarkan menjadi 2 desa yaitu desa Malasin dan Babul Makmur, tetapi kata Sibigo masih tetap digunakan sebagai ibu kota kecamatan tersebut. Diketahui masyarakat Simeulue Barat pada umumnya bekerja sebagai nelayan dan petani dengan memanfaatkan lahan yang mereka miliki.

Sedangkan batas wilayah kabupaten Simeulue Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

4.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner pada tiap-tiap kantor desa yang ada di Kecamatan Simeulue Barat sebanyak 6 desa. Penyebaran kuesioner diberikan kepada aparatur desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan. Berikut merupakan hasil yang menunjukkan secara singkat mengenai kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang dikembalikan, pengisian tidak lengkap dan kuesioner yang diolah. Adapun rincian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rincian Pengembalian Kuesioner

No	Desa	Jumlah	Persentase (%)
1.	Amabaan	6	100%
2.	Lhok Bikhao	6	100%
3.	Lhok Makmur	6	100%
4.	Miteum	6	100%
5	Sanggiran	6	100%
6	Ujung Harapan	6	100%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pengembalian kuesioner yang dilakukan, maka diperoleh ringkasan responden yang diperoleh berdasarkan jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut:

1. Responden Berdasarkan Umur

Adapun karakteristik berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Umur Responden

Kode	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	25-30	12	33%
2	31-35	9	25%
3	36-40	7	19%
4	41-45	8	22%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa, umur responden sebanyak 36 orang dengan rinciannya yaitu umur 41-45 tahun sebanyak 8 orang (22%), responden dengan umur 36-40 tahun sebanyak 7 orang (19%), responden dengan umur 31-35 tahun sebanyak 9 orang (25 %), serta responden dengan umur dibawah 25-30 tahun sebanyak 12 orang (33%) dimana memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Tinggi persentase usia pada umur 25-30 tahun yang merupakan rentang usia produktif sehingga responden di usia ini memiliki kompetensi yang lebih baik daripada rentang usia yang lain.

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden

Kode	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	33	92%
2	Perempuan	3	8%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang dipilih sebagai sampel sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 33 orang (92%) dibandingkan perempuan dengan jumlah 3 orang (8%). Tingginya

persentase laki-laki disebabkan oleh kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpin di suatu jabatan. Laki-laki jauh lebih dipercaya karena memiliki ketegasan dalam memimpin dibandingkan perempuan.

3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan

Kategori	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	17	47%
4	S1	19	53%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa aparatur pengelolaan dana desa diketahui sebagian besar adalah tamatan S1 dengan jumlah persentase 53% selanjutnya tamatan SMA dengan jumlah persentase 47 %.

4. Responden Berdasarkan Jabatan

Responden berdasarkan jabatan yang diperoleh melalui kuesioner dikelompokkan menjadi 6 kategori yaitu dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Jabatan Responden

No	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Desa	6	17%
2	Sekretaris Desa	6	17%
3	Kepala Urusan Perencanaan	6	17%
4	Kepala Urusan Keuangan	6	17%
5	Kepala Seksi Pemerintahan	6	17%
6	Kepala Seksi Kesejahteraan	6	17%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan masing-masing sebanyak 6 orang (17%).

4.3 Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik digunakan untuk menguji ukuran tendensi data dan dispersi data. Dari 36 responden dalam penelitian ini menggunakan nilai mean, median, mode, standar deviation, range, minimum, maksimum dan sum. Dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.6
Uji Deskriptif Statistik

<i>Descriptive Statistics</i>			
		Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> (X)	Perkembangan Pembangunan Desa (Y)
N	Valid	36	36
	Missing	0	0
Mean		59,92	36,58
Median		59	36
Mode		58	36
Std. Deviation		5,239	3,5
Range		30	18
Minimum		45	27
Maximum		75	45
Sum		2157	1317

Sumber : Data Olahan Output SPSS versi 26 (2023)

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa N pada masing-masing variabel penelitian adalah valid yaitu 36. Adapun hasil analisis menggunakan statistik deskriptif untuk variabel pelaksanaan prinsip *good governance* menunjukkan nilai mean sebesar 59,92, nilai median sebesar 59,

nilai mode sebesar 58, nilai standar deviation sebesar 5,239, nilai range sebesar 30, nilai minimum sebesar 45, nilai maksimum sebesar 75 dan nilai sum sebesar 2157. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang pelaksanaan prinsip *good governance* sudah dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya perkembangan pembangunan desa menunjukkan nilai mean sebesar 36,58, nilai median sebesar 56, nilai mode sebesar 36, nilai standar deviation sebesar 3,5, nilai range sebesar 18, nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 45 dan nilai sum sebesar 1317. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang perkembangan pembangunan desa sudah dilaksanakan dengan baik.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51).

- Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan.
- Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item dinyatakan valid atau dapat dipergunakan.

Berdasarkan hasil validitas didapatkan dua variabel, yaitu variabel independen diantaranya prinsip pelaksanaan *good governance* (X) dan variabel

dependen yaitu perkembangan pembangunan desa (Y). Suatu item dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan $df = 34$ adalah 0,329. Nilai r_{hitung} setiap item dalam variabel X dan Y dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Nilai r Hitung (Pearson Correlation)	Nilai r Tabel	Keterangan
Pelaksanaan Prinsip Good Governance (X)			
X.1	0,541	0,329	Valid
X.2	0,541	0,329	Valid
X.3	0,885	0,329	Valid
X.4	0,408	0,329	Valid
X.5	0,430	0,329	Valid
X.6	0,751	0,329	Valid
X.7	0,866	0,329	Valid
X.8	0,691	0,329	Valid
X.9	0,771	0,329	Valid
X.10	0,885	0,329	Valid
X.11	0,849	0,329	Valid
X.12	0,723	0,329	Valid
X.13	0,897	0,329	Valid
X.14	0,823	0,329	Valid
X.15	0,866	0,329	Valid
Perkembangan Pembangunan Desa (Y)			
Y.1	0,887	0,329	Valid
Y.2	0,932	0,329	Valid
Y.3	0,771	0,329	Valid
Y.4	0,867	0,329	Valid
Y.5	0,915	0,329	Valid
Y.6	0,873	0,329	Valid
Y.7	0,788	0,329	Valid
Y.8	0,934	0,329	Valid
Y.9	0,878	0,329	Valid

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa, seluruh item memiliki nilai koefisien korelasi positif lebih besar daripada r_{tabel} dengan nilai signifikan 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir-butir pertanyaan ataupun pernyataan yang ada dalam kuesioner telah memenuhi uji validitas.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan (Ghozali, 2018: 45), dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>N of items</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> (X)	15	0,919	Reliabel
Perkembangan Pembangunan Desa (Y)	9	0,959	Reliabel

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa, *Cronbach Alpha* dari variabel pelaksanaan prinsip *good governance* adalah 0,919 dan variabel perkembangan pembangunan desa adalah 0.959. Jadi angka tersebut lebih besar dari nilai *Cronbach Alpha* 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa dapat dikatakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang dipakai dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Saputra, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Adapun yang dihasilkan dalam pengujian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1,32889302
Most Extreme Differences	Absolute	0,124
	Positive	0,124
	Negative	-0,091
Test Statistic		0,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,178 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa, hasil uji normalitas yang sudah diuji dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berdasarkan hasil pengujian di dapatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari pada taraf kepercayaan 5% ($0,178 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu situasi tidak konstannya *varians*, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan dilakukan pengujian menggunakan metode *glejser* dengan ketentuan apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila $\text{sig} < 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients^a				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,664	1,661		-1,001	0,324
	Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> (X)	0,044	0,028	0,265	1,601	0,119

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *glejser* pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa, nilai signifikansi untuk variabel pelaksanaan prinsip *good governance* sebesar 0,119. Variabel tersebut memiliki tingkat $\text{sig} > 0,05$ ($0,119 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk dapat membuktikan adanya pengaruh pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pemnbagunan desa , dilakukan dengan uji

regresi linear sederhana. Adapun hasil uji regresi menggunakan *SPSS* versi 26 yang ditunjukkan pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-0,446	2,616	
	Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> (X)	0,618	0,043	0,925

a. Dependent Variable: Perkembangan Pembangunan Desa (Y)

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa, nilai koefisien regresi yang diperoleh. Maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = -0,446 + 0,618 X + \varepsilon$$

Konstanta = Sebesar -0,446 yang berarti bahwa jika pelaksanaan prinsip *good*

(a) *governance* tidak dipengaruhi oleh variabel perkembangan pembangunan desa, maka besarnya variabel pelaksanaan prinsip *good governance* sebesar -0,446.

X = Nilai 0,618 adalah besarnya koefisien regresi X (Pelaksanaan prinsip *good governance*), yang berarti setiap peningkatan X sebesar 1% maka akan meningkatkan Y sebesar 0,618 atau 61,8%. Jika variabel pelaksanaan prinsip *good governance* meningkat maka perkembangan pembangunan desa akan meningkat.

4.7 Pengujian Hipotesis

4.7.1 Uji Parsial (t-test)

Uji t digunakan untuk dapat membuktikan pengaruh pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa. Nilai t_{tabel} dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan $df = 34$ adalah 2,032. Adapun hasil uji t terdapat pada tabel 4.12 dibawah ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,446	2,616		-0,170	0,866
	Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> (X)	0,618	0,043	0,925	14,207	0,000

a. Dependent Variable: Perkembangan Pembangunan Desa (Y)

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial yang dapat dilihat pada tabel 4.12, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* terhadap Perkembangan Pembangunan Desa (X) $t_{\text{hitung}} = 14,207 > t_{\text{tabel}} = 2,032$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa.

4.7.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk dapat mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat pada *R Square* dan dinyatakan dalam presentase Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011:136). Adapun hasil uji *Model Summary* yang terdapat pada tabel 4.13 dibawah ini.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,925 ^a	0,856	0,852	1,34829
a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> (X)				

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa, nilai *R Square* sebesar 0,856. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh pelaksanaan prinsip good governance (X) secara simultan terhadap perkembangan pembangunan desa (Y) adalah sebesar 85,6% dan sisanya sebesar 14,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti kurangnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan, sarana transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, rusaknya jalan menuju areal pertanian, minimnya sarana air bersih serta terbatasnya lapangan pekerjaan.

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Perkembangan Pembangunan Desa

Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,207 > 2,032$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan desa. Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dengan *good governance* terbukti telah banyak membawa dampak yang positif bagi tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin (2020) dan Nasution (2018) Hasil penelitiannya menunjukkan mayoritas responden mengatakan bahwa tata kelola pembangunan sesuai dengan penerapan *Good governance* sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang telah cukup transparan,.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Maharani Mufti Rahajeng (2021) Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu belum mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi yang diterapkan juga belum tegas.

Diketahui pelaksanaan prinsip *good governance* di Kecamatan Simeulue Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-

prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Melihat pentingnya penerapan prinsip *good governance* ini menjadikan prinsip *good governance* sebaiknya dapat diaplikasikan di setiap sektor pemerintahan termasuk sektor keuangan publik di tingkat desa dengan memperhatikan agenda kebijakan pemerintah. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip *Good governance* pemerintah desa yang ada di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue selalu mengadakan rapat terbuka tahunan terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Dimana rapat ini mengundang seluruh elemen masyarakat gampong yang ada di Kecamatan Simeulue Barat.

Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah. Pembangunan Infrastruktur yang ada dipedesaan seperti sarana dan prasarana kesehatan, sarana transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, jalan menuju areal pertanian, sarana air bersih serta terbatasnya lapangan pekerjaan tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa guna meningkatkan perbaikan atas pembangunan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat desa selanjutnya agar lebih baik dalam proses perkembangan pembangunan desa di Kecamatan Simeulue Barat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan untuk variabel pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa. $t_{hitung} = 14,207 > t_{tabel} = 2,032$ dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap perkembangan pembangunan desa.

Nilai *R Square* sebesar 0,856. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y adalah sebesar 85,6% dan sisanya sebesar 14,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan dua variabel yaitu pelaksanaan prinsip *good governance* dan perkembangan pembangunan desa. Serta objek penelitian ini hanya pada desa-desa yang ada Kecamatan Simeulue Barat yang mengakibatkan hasil penelitian belum tergeneralisasikan dengan tepat. Maka dengan permasalahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka peneliti mencoba memberi saran atau masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Simeulue Barat hendaknya dapat memulai untuk melakukan pembangunan dalam segi pemberdayaan masyarakat, hal ini berguna agar sumber daya manusia yang ada semakin

berdaya guna saing sehingga mampu menghadapi kemajuan jaman di era globalisasi ini. Perkembangan beberapa aspek yaitu aspek regulasi, tata laksana, pengawasan dan kualitas sumber daya manusia yang mengurus dana desa. Meningkatkan sistem Zona Integritas bagi setiap desa sehingga Pemerintah desa.

Selanjutnya peningkatan fungsi dari berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok PKK, kelompok tani, serta karang taruna, sehingga kelompok tersebut dapat mengembangkan program yang mampu dirasakan masyarakat desa. Sedangkan bagi masyarakat desa perlu adanya kesadaran akan partisipasi dalam pembangunan desa sangatlah penting. Hal ini akan mencegah adanya kewenangan yang disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel, dan dapat menggunakan variabel independen yang lebih lengkap dan bervariasi seperti pelayanan publik, sumber daya manusia dan sumber daya alam agar hasil penelitian lebih tergeneralisasi. Kemudian peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 10(2), 164-180.
- kemenkeu (2015). Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Diakses tanggal 2 November 2019 dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/22TAHUN2015PP>
- Erwan, A. (2011). *Metode Penelitian Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta., CVAndi Offset.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Aplikasi Multivariete SPSS 25*. Semarang., Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).
- Humairah, H., & Lestari, S. (2020). Analisis Pengaruh Anggaran Apbdesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. *Journal Of Economic Science (JECS)*, 6(1), 26-35.
- LAN dan BPKP. (2015). *Akuntabilitas dan Good Governance, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta., LAN.
- Lisnawati, L., & Lestari, S. (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4(2), 159.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92.
- Nasution, S. R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2), 72-77.

- Notoadmojo. (2018). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta., YKPN.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443-452.
- Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163-174.
- Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163-174.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18-33.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta., Salemba Empat.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- Sudrajat, A., & Darusman, C. (2018). Perkembangan dan pembangunan desa padamukti kecamatan solokanjeruk kabupaten bandung. *Geoarea/ Jurnal Geografi*, 1(1), 50-54.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung., Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta., Pustaka Baru.
- Tuhumury, Y. J., & Wance, M. (2020). Membangun good governance dalam pemanfaatan keuangan desa (studi pada desa Wayame kecamatan Teluk Ambon). *Indonesian Governance Journal*, 3(01), 37-45.
- Umar, H. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta., Bumi Aksara

Yanti, C. N., Nasruddin, N., & Saifuddin, S. (2020). Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa. *Kandidat: Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan*, 2(1), 8-14.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)

A. Identitas Responden

Berilah tanda ceklis pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan data diri anda. Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data dibawa ini :

1. Nama Desa :
2. Nama Responden :
3. Jenis Kelamin :
 Laki-Laki Perempuan
4. Umur
 25-30 tahun 31-35 tahun
 36-40 tahun 41-45 tahun
 40 tahun
5. Pendidikan Terakhir
 SD SI
 SMP Lainnya
 SMA
6. Jabatan/Pangkat
 Kepala Desa Sekretaris Desa
 Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Perencanaan
 Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Kesejahteraan

Berikan Jawaban Dengan Memberikan Tanda Silang (X) Untuk Kuesioner Berikut Ini: Alternatif Jawaban Yang Disediakan

STS : Sangat Tidak Setuju

RR : Ragu Ragu

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Variabel X

Pelaksanaan Prinsip *Good Governace*

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
Prinsip Akuntabilitas						
1	Pemerintah desa menetapkan rincian fungsi, tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing yang selaras dengan tujuan pemerintah desa					
2	Aparat pemerintah desa memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut					
3	Dalam rangka memepertanggung jawabkan kinerjanya, setiap aparat pemerintah desa melaksanakan tugasnya 5secara jujur terutama dalam proses pengelolaan alokasi dana desa					
4	Pertanggungjawaban alokasi dana desa harus disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
5	Pemerintah desa menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat terutama proses pelaksanaan pelaksanaan alokasi dana desa					
Prinsip Transparansi						
1	Pemerintah desa menyediakan informasi proses pengelolaan alokasi dana desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatannya					
2	Pemerintah desa mengumumkan					

	secara terbuka proses pengelolaan alokasi agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya					
3	Pemerintah desa menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa					
4	Pemerintah desa menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaan					
5	Kelengkapan penyediaan informasi pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.					
Prinsip Supremasi Hukum						
1	Penyusunan rapbdesa dilakukan secara terkoordinasi, dengan mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.					
2	Rapbdesa mengandung nilai yang mendukung terwujudnya supremasi hukum demi terciptanya kepastian hukum dan masyarakat					
3	Dalam proses pengelolaan alokasi dana desa pemerinta desa menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional jujur dan taat sehinggah terhindar dari praktek kolusi,korupsi,dan nepotisme					
4	Pemerintah desa memastikan terwujudnya penyelenggaraan alokasi dana desa yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip					
5	Jika terdapat pelanggaran dalam proses pengelolaan alokasi dana desa akan ada sanksi yang dilakukan secar taat sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

Sumber Putri.E.T.A (2019)

Variabel Y**Perkembangan Pembangunan Desa**

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
Pendidikan Masyarakat						
1	Pendidikan yang dimiliki masyarakat akan mempengaruhi pembangunan desa					
2	Pendidikan sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa					
3	Masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu akan dapat lebih meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa					
Kesehatan Masyarakat						
1	Kesehatan masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa					
2	Penyuluhan dan program kesehatan masyarakat wajib diadakan dalam pembangunan desa					
3	Menurut saya sarana kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa					
Ekonomi Masyarakat						
1	Pembangunan desa tersebut sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat saat ini					
2	Masyarakat mendapatkan manfaat kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan desa					
3	Pembangunan desa saat ini menyerap banyak prekonomian masyarakat					

Sumber Sedy.A.A, (2020)

Lampiran 3 :

UJI VALIDITAS DAN REALIABILITAS

Correlations																	
		X1 1	X1 2	X1. 3	X1. 4	X1 .5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10	X1. 11	X1. 12	X1. 13	X1. 14	X1. 15	X Total
X1.1	Pearson Correlation	1	1,000**	0,237	,389*	0,279	0,000	0,234	0,287	0,018	0,237	0,327	0,047	0,328	0,328	0,234	,541**
	Sig. (2- tailed)		0,000	0,164	0,019	0,099	1,000	0,169	0,089	0,919	0,164	0,051	0,786	0,051	0,051	0,169	0,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.2	Pearson Correlation	1,000**	1	0,237	,389*	0,279	0,000	0,234	0,287	0,018	0,237	0,327	0,047	0,328	0,328	0,234	,541**
	Sig. (2- tailed)	0,000		0,164	0,019	0,099	1,000	0,169	0,089	0,919	0,164	0,051	0,786	0,051	0,051	0,169	0,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.3	Pearson Correlation	0,237	0,237	1	0,267	0,327	,786**	,925**	,525**	,862**	1,000**	,793**	,748**	,852**	,704**	,767**	,885**
	Sig. (2- tailed)	0,164	0,164		0,115	0,052	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.4	Pearson Correlation	,389*	,389*	0,267	1	,414*	0,097	0,158	-0,118	0,208	0,267	0,106	0,315	0,176	-0,008	0,060	,408*
	Sig. (2- tailed)	0,019	0,019	0,115		0,012	0,573	0,357	0,494	0,224	0,115	0,539	0,061	0,305	0,965	0,728	0,014
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.5	Pearson Correlation	0,279	0,279	0,327	,414*	1	0,149	0,183	0,029	0,291	0,327	0,324	0,287	0,187	0,187	0,183	,430**
	Sig. (2- tailed)	0,099	0,099	0,052	0,012		0,387	0,285	0,868	0,085	0,052	0,054	0,090	0,276	0,276	0,285	0,009

	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.6	Pearson Correlation	0,000	0,000	,786**	0,097	0,149	1	,841**	,581**	,928**	,786**	,594**	,828**	,786**	,629**	,841**	,751**
	Sig. (2-tailed)	1,000	1,000	0,000	0,573	0,387		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.7	Pearson Correlation	0,234	0,234	,925**	0,158	0,183	,841**	1	,717**	,772**	,925**	,716**	,673**	,925**	,767**	,830**	,866**
	Sig. (2-tailed)	0,169	0,169	0,000	0,357	0,285	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.8	Pearson Correlation	0,287	0,287	,525**	-0,118	0,029	,581**	,717**	1	,397*	,525**	,748**	,341*	,799**	,936**	,864**	,691**
	Sig. (2-tailed)	0,089	0,089	0,001	0,494	0,868	0,000	0,000		0,017	0,001	0,000	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.9	Pearson Correlation	0,018	0,018	,862**	0,208	0,291	,928**	,772**	,397*	1	,862**	,674**	,886**	,717**	,571**	,772**	,771**
	Sig. (2-tailed)	0,919	0,919	0,000	0,224	0,085	0,000	0,000	0,017		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.10	Pearson Correlation	0,237	0,237	1,000**	0,267	0,327	,786**	,925**	,525**	,862**	1	,793**	,748**	,852**	,704**	,767**	,885**
	Sig. (2-tailed)	0,164	0,164	0,000	0,115	0,052	0,000	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.11	Pearson Correlation	0,327	0,327	,793**	0,106	0,324	,594**	,716**	,748**	,674**	,793**	1	,574**	,793**	,934**	,866**	,849**

YTotal	Pearson Correlation	,887**	,932**	,771**	,867**	,915**	,873**	,788**	,934**	,878**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).											
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).											

Uji Reliabilitas (X)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,919	0,939	15

Uji Reliabilitas Y

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,959	0,961	9

Tabel r Product Moment
Pada sig 0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.8205 2	63.65674	318.308 84
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.3271 2
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.2145 3
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688